

# Zulfadli Diperiksa UJ Menyusul

## Kasus Dugaan Korupsi Bansos

PONTIANAK—Setelah menunggu hampir empat tahun, pengusutan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial komite olahraga Nasional Indonesia Kalbar senilai Rp22,14 miliar untuk tahun anggaran 2006-2009 mulai ada kemajuan.

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menegaskan tidak stagnan. Hal itu ditandai dengan diperiksanya anggota DPR-RI Zulfadli sebagai saksi dalam kasus tersebut. Sementara pemeriksaan terhadap Usman Jafar --mantan Gubernur dan Ketua KONI Kalbar yang kini juga anggota DPR-RI -- bakal menyusul.

◆ Ke Halaman 7 Kolom 1



# Zulfadli Diperiksa UJ Menyusul

Sambungan dari hal 1

Zulfadli diperiksa pada Selasa (17/1) lalu di Mapolda Kalbar selama tujuh jam. Sejak pukul 08.00 hingga 15.00. Berkapasitas sebagai saksi untuk tersangka Iswanto, mantan Wakil Bendahara KONI. Keterangan Zulfadhli dan UJ merupakan kelengkapan bagi Polda Kalbar untuk mendapatkan hasil audit BPK. Hal tersebut telah menjadi petunjuk BPK kepada polisi. Bahwa diperlukan keterangan kedua anggota legislatif di Senayan

dari Daerah Pemilihan Kalbar itu. Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar, Kamis (19/1) mengatakan pemeriksaan Zulfadli sebagai saksi tanpa mengantongi izin Presiden. Tetapi pihaknya mengacu kepada Pasal 289 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Dimana, menurut Mukson, jika tidak ada persetujuan tertulis dalam waktu 30 hari untuk anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka proses penyelidikan dan penyidikan sudah dapat dilaku-

menjabat sebagai Sekda Kalbar telah diperiksa. Kemudian Polda Kalbar mengambil alih penanganan kasus tersebut sejak tanggal Januari 2010. Namun sejak pengambilalihan itu, penanganannya sempat tersendat hampir satu tahun hingga Januari 2011. Polda beralasan tidak mengantongi audit, karena hasil audit tersebut sudah diserahkan BPK ke KPK. Dan, KPK sempat mengusut kasus tersebut.

Namun, berdasarkan surat KPK nomor R-2192/01-20/14/2010 tanggal 9 Desember 2010 yang ditandatangani salah satu ketuanya, Moch Jasin, KPK kembali menyerahkan penanganan Bansos KONI ke Polda Kalbar. Anggota DPR daerah pemilihan Kalimantan Barat Zulfadhli saat dikonfirmasi membenarkan dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Polda Kalbar sebagai saksi atas tersangka Iswanto terkait penggunaan dana bantuan sosial KONI.

"Saya datang ke Polda. Meski izin presiden belum turun, saya kooperatif untuk memenuhi panggilan tersebut. Saya ingin proses hukum ini bisa cepat selesai. Kalaupun nanti penyidik merasa keterangan saya belum cukup, saya siap untuk memberikan keterangan berikutnya," kata

Zulfadhli yang dihubungi dari Pontianak, kemarin. Ketika kasus itu terjadi, Zulfadhli bertugas sebagai Ketua Pelatda PON 2008 di Kaltim. Ia bertanggung jawab terhadap penggunaan dana yang dibantu oleh KONI Kalbar. Bukan itu saja, ia juga dimintai keterangan berkaitan dengan tugasnya sebagai Ketua Pengprov PSSI Kalbar, baik pengembangan persepakbolaan di daerah ini, juga pembangunan tribun di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman.

"Semua sudah dipertanggungjawabkan, baik sebagai Ketua Pelatda PON 2008, Ketua Pengprov PSSI, maupun pembangunan tribun itu. Semuanya sudah, lengkap dengan bukti-bukti. Sudah disampaikan dan diterima KONI Kalbar. Sudah tidak ada masalah," jelas Zulfadhli. Seperti diketahui, mencuatnya kasus Bansos ini bermula dari hasil audit regularyang dilakukan BPK Perwakilan Kalbar terhadap Laporan Keuangan Pemprov tahun anggaran 2008, termasuk dana Bansos tahun 2006 hingga tahun 2008. (baca Pontianak Post, 10 Januari, 2011) Terhadap laporan keuangan tersebut, BPK memutuskan tidak menyatakan pendapat alias disclaimer opinion (DO). Penyebab DO, BPK

kan tanpa menunggu turunnya persetujuan Presiden yang dikeluarkan melalui Sekrestaris Kabinet. Mukson menambahkan, Polda Kalbar terus mengupayakan pengusutan kasus dugaan korupsi dana Bansos KONI. Karena itu surat pemanggilan saksi dikirim Polda melalui Ketua DPR-RI. Agar saksi memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan. Tanpa menunggu izin Presiden terbit. Sementara pemanggilan UJ, lanjut Mukson, segera menyusul. Pihaknya tetap meminta keterangan dari mantan Gubernur Kalbar itu. Meski belum dapat merinci jelas kapan pemeriksaannya. "Dalam waktu

tidak meyakini beberapa item penggunaan anggaran. Jumlah terbesar diketahui berada pada sektor penggunaan dana Bansos untuk KONI, serta beberapa item anggaran lainnya.

Untuk meneliti penggunaan dana tersebut, BPK Perwakilan Kalbar kemudian membentuk tim Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Tim yang berjumlah lima orang itu melakukan penelitian dengan fokus utama penelitian dana Bansos dan bantuan untuk KONI. Dari hasil penelitian PDTT, BPK Perwakilan Kalbar mengindikasikan adanya kerugian negara. Indikasi ini selanjutnya diproses oleh BPK Perwakilan Kalbar dan BPK Pusat yang hasilnya menemukan empat item penggunaan Bansos bermasalah.

Empat item itu adalah temuan dana Bansos untuk KONI Kalbar dan Dewan Pembina Fakultas Kedokteran Untan, yang digunakan untuk menalangi pinjaman pimpinan dan beberapa anggota DPRD Kalbar kepada Sekretariat Daerah sebesar Rp 10,07 miliar. Kemudian pengeluaran keuangan KONI Kalbar oleh Wakil Bendahara KONI kepada Satgas Prapon sebesar Rp1,368 miliar yang tidak dipertanggungjawabkan. (stm/mnk)

dekat akan diperiksa," katanya.

Kuasa Hukum Zulfadli, Roliandisyah, membenarkan jika kliennya telah memenuhi panggilan sebagai saksi untuk tersangka Iswanto dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos KONI. Ketika diperiksa, lanjutnya, Zulfadli datang sendiri ke Polda Kalbar.

Kasus Bansos KONI Kalbar sendiri mulai ditangani kepolisian sejak November 2009 silam. Poltabes (sekarang Polresta) Pontianak resmi melakukan penyelidikan sejak 20 November 2009. Bahkan sejumlah saksi yang diduga mengetahui penggunaan uang tersebut, termasuk Syakirman, yang kala itu masih